

Meningkatkan Posisi Literasi Digital Indonesia

Oleh: Yappi Manafe

Mantan Kepala Biro Perencanaan, Mantan Kepala Biro Hukum
Kementerian KOMINFO

Pengantar

Di era digital yang berkembang sangat pesat, literasi digital telah menjadi prasyarat fundamental bagi individu untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan masyarakat modern. Literasi digital tidak lagi terbatas pada kemampuan dasar mengoperasikan komputer, tetapi mencakup kemampuan berpikir kritis, komunikasi digital, kolaborasi, keamanan digital, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Abad ke-21 ditandai oleh ketergantungan yang semakin besar terhadap teknologi digital yang telah merambah hampir ke seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, dunia kerja, interaksi sosial, hingga penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (*“Artificial Intelligence/AI”*), *“Internet of Things (IoT)”*, serta komputasi yang hadir secara menyeluruh (*“ubiquitous computing”*) telah menjadikan kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dalam lingkungan digital sebagai suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini, literasi digital tidak lagi dipandang sebagai keterampilan tambahan, melainkan sebagai kompetensi inti yang diperlukan agar individu dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat modern.

Posisi literasi digital di Indonesia saat ini menunjukkan kecenderungan (*“tren”*) yang membaik, tetapi masih berada pada tingkat menengah. Meskipun akses internet dan penggunaan teknologi digital terus meningkat, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara kritis, aman, produktif, inovatif dan bertanggung jawab masih menjadi tantangan utama, agar mampu mendukung visi Indonesia sebagai negara digital yang berdaya saing tinggi. Bagi Indonesia, keterampilan literasi digital sangat penting untuk mendukung: Transformasi digital pemerintahan; Peningkatan daya saing ekonomi digital; Penguatan keamanan siber nasional; Peningkatan kualitas sumber daya manusia; Pencegahan hoaks, penipuan digital, dan kejahatan siber; Pemanfaatan AI secara produktif dan bertanggung jawab di sektor pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Dengan demikian, literasi digital abad ke-21 tidak lagi sekadar kemampuan menggunakan perangkat digital, melainkan kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara kritis, aman, etis, serta inovatif untuk pembelajaran, pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat

Definisi Literasi Digital

Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (*“Information and Communication Technology/ICT”*) untuk menemukan, mengevaluasi, menciptakan, serta mengomunikasikan informasi secara efektif. Pada awal perkembangannya, konsep literasi digital lebih berfokus pada kemampuan dasar menggunakan komputer. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, cakupannya berkembang menjadi berbagai kompetensi yang meliputi komunikasi daring, kolaborasi digital, literasi informasi, literasi media, hingga keamanan siber.

Paul Gilster (1997) merupakan salah satu akademisi pertama yang memperkenalkan istilah *“digital literacy”*. Ia mendefinisikan Literasi Digital sebagai kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan informasi dalam berbagai format yang berasal dari beragam sumber ketika informasi tersebut disajikan melalui komputer. Sejak diperkenalkan, definisi literasi digital terus mengalami perkembangan yang signifikan, terutama seiring dengan munculnya teknologi Web 2.0 (generasi kedua layanan Internet yang interaktivitas, kolaborasi, dan konten buatan pengguna), perangkat bergerak (*“mobile technologies”*), media sosial, komputasi awan (*“cloud computing”*), serta berbagai inovasi digital lainnya yang mengubah cara manusia mengakses, memproduksi, dan berbagi informasi. Pentingnya literasi digital tercermin dari banyaknya inisiatif nasional maupun regional yang dikembangkan untuk menyusun kerangka kerja (*“framework”*) dan rencana strategis guna meningkatkan kompetensi digital masyarakat.

Literasi digital didefinisikan juga sebagai kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman, tepat, dan bertanggung jawab melalui teknologi digital guna mendukung pekerjaan, pekerjaan yang layak (*“decent work”*), serta kegiatan kewirausahaan. Literasi digital mencakup berbagai kompetensi yang dikenal sebagai literasi komputer, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi informasi, dan literasi media. Terdapat kesepakatan umum bahwa kompetensi literasi digital memerlukan pengetahuan (*“knowledge”*) dan keterampilan (*“skills”*) yang memadai.

Menurut UNESCO, literasi digital mencakup kemampuan mengoperasikan perangkat digital secara fisik serta menguasai penggunaan piranti lunak (*“software”*) yang terdapat di dalamnya. Literasi digital tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga meliputi kemampuan untuk mencari dan menavigasi informasi, menciptakan konten digital, berkomunikasi dan berkolaborasi secara daring, berpikir kritis, menganalisis informasi, serta menjaga keamanan dan kesejahteraan dalam pemanfaatan berbagai teknologi digital.

Keseluruhan kompetensi tersebut merupakan prasyarat penting agar individu dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin terdigitalisasi. Kompetensi literasi digital berada pada suatu spektrum yang berkesinambungan, sehingga tingkat kemampuan yang dibutuhkan berbeda-beda sesuai dengan konteks penerapannya. Konteks tersebut meliputi kehidupan pribadi dan bermasyarakat, dunia kerja dan ketenaga-kerjaan, serta pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, literasi digital bukanlah sekadar penguasaan teknologi, melainkan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital secara tepat, produktif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang kehidupan. Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia digital, baik dalam bentuk inovasi piranti keras maupun piranti lunak yang terus beradaptasi terhadap kebutuhan dan peluang baru, kemampuan yang dimiliki individu juga harus terus berkembang. Oleh karena itu, makna menjadi seseorang yang memiliki literasi digital (*"digitally literate"*) bersifat dinamis dan akan terus berubah mengikuti perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta tuntutan kehidupan di masa depan.

Nilai dan Etika dalam Literasi Digital

Dalam masyarakat global yang semakin terdigitalisasi, literasi digital telah menjadi kompetensi yang sangat penting bagi setiap individu untuk dapat menavigasi dunia informasi dan teknologi digital secara efektif. Namun demikian, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teknologi semata. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang mendasarinya juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk warga digital (*"digital citizens"*) yang bertanggung jawab, berintegritas, dan beretika.

Salah satu nilai fundamental dalam literasi digital adalah akses dan keadilan (*"access and equity"*). Pada era ketika informasi dan teknologi menjadi faktor utama yang menentukan kesempatan ekonomi, pendidikan, serta kualitas hidup seseorang, penyediaan akses digital yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi suatu keharusan. Program-program literasi digital harus diarahkan untuk memperkecil kesenjangan digital (*"digital divide"*), sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang sosial ekonomi maupun wilayah geografis memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi digital. Dengan menjamin akses yang adil dan merata, literasi digital berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing. Prinsip penting lainnya adalah privasi dan keamanan (*"privacy and security"*). Meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital menyebabkan perlindungan terhadap data pribadi dan penghormatan terhadap hak privasi menjadi semakin penting. Oleh karena itu, literasi digital menekankan pemahaman mengenai perlindungan data, persetujuan penggunaan data (*"consent"*), enkripsi, serta berbagai langkah keamanan siber. Pengetahuan tersebut memungkinkan individu menjaga identitas digital dan keamanan informasi pribadinya, sehingga dapat mengurangi risiko kebocoran data, pencurian identitas, maupun pelanggaran privasi.

Dengan demikian, literasi digital berkontribusi dalam membangun kepercayaan (*“trust”*) dan integritas dalam setiap interaksi di ruang digital. Dalam lingkungan digital yang dipenuhi oleh arus informasi yang sangat besar, berpikir kritis dan literasi media (*“critical thinking and media literacy”*) merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari literasi digital. Masyarakat dituntut mampu mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, membedakan antara informasi yang benar dengan misinformasi maupun disinformasi, serta mengenali berbagai bentuk bias dalam penyajian informasi. Literasi digital mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis sehingga individu dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang valid dan terpercaya. Selain itu, literasi media juga membekali masyarakat dengan kemampuan memahami proses produksi, distribusi, serta tujuan di balik suatu konten media, sehingga mendorong konsumsi informasi digital yang lebih bertanggung jawab. Literasi digital juga menempatkan perilaku etis di ruang digital (*“ethical online behaviour”*) sebagai salah satu nilai utama. Prinsip-prinsip seperti rasa hormat, integritas, tanggung jawab, dan empati menjadi landasan dalam berinteraksi secara daring. Oleh karena itu, literasi digital menanamkan pentingnya etika berkomunikasi (*“netiquette”*), kewargaan digital yang bertanggung jawab (*“responsible digital citizenship”*), serta terciptanya interaksi digital yang sehat. Berbagai perilaku negatif seperti perundungan siber (*“cyberbullying”*), ujaran kebencian (*“hate speech”*), dan pelecehan daring (*“online harassment”*) harus dicegah melalui penguatan nilai-nilai etika tersebut, sehingga tercipta lingkungan digital yang aman, inklusif, dan saling menghormati. Nilai berikutnya adalah penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual dan hak cipta (*“intellectual property and copyright”*). Kemajuan teknologi telah mempermudah masyarakat dalam mengakses, menggandakan, dan menyebarkan berbagai bentuk konten digital. Oleh karena itu, literasi digital menekankan pentingnya memahami ketentuan mengenai hak cipta, prinsip penggunaan yang wajar (*“fair use”*), serta etika dalam menggunakan dan membagikan karya digital. Penghormatan terhadap hak-hak pencipta tidak hanya melindungi kepentingan hukum para kreator, tetapi juga mendorong tumbuhnya kreativitas, inovasi, dan budaya menghargai hasil karya intelektual. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas (*“transparency and accountability”*) merupakan prinsip yang semakin penting dalam era digital. Berbagai aktivitas digital saat ini melibatkan pengumpulan data, algoritma kecerdasan buatan, periklanan digital, dan sistem pengambilan keputusan otomatis. Oleh sebab itu, literasi digital mendorong adanya keterbukaan mengenai bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan diproses, serta bagaimana algoritma memengaruhi keputusan yang diambil. Di sisi lain, individu juga didorong untuk bertanggung jawab atas setiap aktivitas digital yang dilakukan, sehingga tercipta ekosistem digital yang lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya. Aspek lain yang semakin mendapat perhatian adalah kesejahteraan digital (*“digital well-being”*).

Ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan fisik maupun mental apabila tidak dikelola secara bijaksana. Oleh karena itu, literasi digital menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan kehidupan nyata melalui pengelolaan waktu layar (*screen time*), pembentukan kebiasaan digital yang sehat, serta perhatian terhadap kesehatan mental, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa mengorbankan kesejahteraan individu. Literasi digital juga mengandung nilai pemberdayaan dan pembelajaran sepanjang hayat (*"lifelong learning"*). Literasi digital membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk memanfaatkan teknologi secara produktif dalam kehidupan pribadi, pendidikan, maupun dunia kerja. Mengingat perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, literasi digital juga menanamkan pentingnya pembelajaran berkelanjutan agar individu senantiasa mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi, perkembangan kecerdasan buatan, serta transformasi digital yang terus berlangsung.

Secara keseluruhan, nilai-nilai dan prinsip etika yang mendasari literasi digital merupakan fondasi penting dalam membentuk masyarakat digital yang bertanggung jawab. Dengan menginternalisasi prinsip-prinsip akses dan keadilan, privasi dan keamanan, berpikir kritis dan literasi media, perilaku etis di ruang digital, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, transparansi dan akuntabilitas, kesejahteraan digital, pemberdayaan, serta pembelajaran sepanjang hayat, individu tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi secara efektif, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ekosistem digital yang lebih inklusif, adil, aman, dan beretika.

Literasi Digital dalam Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, penguasaan literasi digital perlu ditanamkan sejak usia dini. Literasi digital dalam pendidikan mengharuskan peserta didik memiliki berbagai keterampilan yang memungkinkan mereka membaca, memahami, serta berinteraksi dengan materi pembelajaran digital yang memuat berbagai sumber pendukung, seperti rekaman audio, grafik, diagram, video, maupun media interaktif lainnya. Selain itu, peserta didik tidak lagi hanya dituntut menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu menciptakan, berkolaborasi, dan membagikan konten digital secara bertanggung jawab. Perubahan paradigma ini menuntut pendidik untuk memahami pentingnya membekali peserta didik dengan kemampuan memanfaatkan teknologi digital secara aman, efektif, kritis, dan etis. Kemampuan mencari serta membaca informasi secara mandiri melalui internet memang merupakan salah satu indikator literasi digital yang penting. Namun demikian, literasi digital tidak terbatas pada kemampuan membaca informasi secara daring. Membaca buku elektronik, misalnya, pada dasarnya memiliki proses yang hampir sama dengan membaca buku cetak, hanya berbeda pada media penyajiannya.

Pengguna mungkin hanya perlu menguasai keterampilan dasar, seperti mengoperasikan perangkat dan menavigasi halaman digital, akan tetapi, literasi digital sesungguhnya mencakup kompetensi yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar keterampilan teknis tersebut.

Seseorang dapat dikatakan memiliki literasi digital yang baik apabila mampu mengintegrasikan keterampilan teknis (*“technical skills”*) dengan keterampilan kognitif (*“cognitive skills”*). Individu tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga dapat menilai kredibilitasnya, mengolahnya secara kritis, menghasilkan pengetahuan atau konten baru, serta mendistribusikannya secara bertanggung jawab melalui berbagai platform digital. Dengan demikian, literasi digital merupakan kombinasi antara kemampuan teknis, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan tanggung jawab etis dalam memanfaatkan teknologi digital, sehingga individu mampu berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam masyarakat digital.

Kondisi Terkini Literasi Digital Nasional

Secara umum, kondisi terkini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Tingkat literasi digital terus meningkat: Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) secara berkala mengukur kemampuan digital masyarakat. Pengukuran sebelumnya menggunakan Indeks Literasi Digital Indonesia (skala 1–5), sedangkan kini dikembangkan menjadi Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang memiliki cakupan lebih luas, meliputi: Infrastruktur dan ekosistem digital; Literasi digital; Pemberdayaan digital; Pekerjaan digital. Perubahan ini dimaksudkan agar pengukuran tidak hanya melihat pada kemampuan individu, tetapi juga kesiapan ekosistem digital secara keseluruhan.
2. Kesenjangan antar-daerah masih cukup besar: Literasi digital belum berkembang secara merata. Wilayah perkotaan, terutama di Pulau Jawa, umumnya memiliki tingkat literasi digital lebih tinggi dibandingkan daerah terpencil. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur internet; tingkat pendidikan; kondisi sosial ekonomi; dan akses terhadap perangkat digital.
3. Tantangan utama: Beberapa persoalan yang masih dihadapi Indonesia meliputi penyebaran hoaks dan disinformasi; rendahnya kemampuan verifikasi informasi; meningkatnya penipuan digital (*“phishing, scam, social engineering”*); perlindungan data pribadi yang belum dipahami secara luas; rendahnya pemanfaatan teknologi digital untuk inovasi dan peningkatan produktivitas UMKM serta sektor publik.

4. Pergeseran fokus menuju masyarakat digital: Saat ini pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan keterampilan menggunakan internet, tetapi juga pada pembentukan masyarakat digital yang mampu menggunakan teknologi secara produktif; meningkatkan daya saing ekonomi; menjaga keamanan siber; memanfaatkan AI dan teknologi baru secara etis; berpartisipasi dalam transformasi digital nasional. Hal ini tercermin dalam penggunaan IMDI sebagai instrumen kebijakan nasional. Bagi Indonesia, literasi digital kini dipandang sebagai kapabilitas strategis, bukan sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat digital. Dalam konteks transformasi digital nasional, literasi digital menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi digital; peningkatan kualitas SDM; penguatan keamanan siber; tata kelola pemerintahan digital (*“digital government”*); pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) secara bertanggung jawab.

Problematika Utama Peningkatan Literasi Digital Nasional

KOMDIGI menghadapi ragam persoalan dalam upaya peningkatan literasi digital nasional sbb:

1. Kesenjangan akses dan kualitas infrastruktur digital: Meskipun penetrasi internet di Indonesia sudah sangat tinggi, kualitas akses internet masih belum merata. Daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) masih menghadapi keterbatasan kecepatan internet, kualitas jaringan, dan ketersediaan perangkat digital. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut belum memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan literasi digital. Kementerian KOMDIGI mengakui bahwa tantangan berikutnya bukan lagi sekadar cakupan layanan, tetapi kualitas konektivitas.
2. Rendahnya kualitas literasi digital masyarakat: Jumlah pengguna internet yang besar tidak selalu diikuti dengan kemampuan menggunakan teknologi secara kritis dan produktif. Banyak pengguna internet masih mudah mempercayai hoaks; menjadi korban penipuan digital (*“online scam”*); belum memahami perlindungan data pribadi; belum mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, KOMDIGI mulai menggeser fokus program dari pengenalan internet menuju peningkatan kecakapan digital yang lebih mendalam.
3. Perkembangan AI (*“Artificial Intelligence”*) yang sangat cepat: Perkembangan AI generatif menimbulkan tantangan baru yang tidak tercakup dalam program literasi digital konvensional, seperti: *“deepfake”*; konten sintesis; otomatisasi pekerjaan; penggunaan AI secara etis; *“prompt engineering”* (menyusun instruksi yang efektif untuk AI); verifikasi informasi yang dihasilkan AI.

Kementerian KOMDIGI menilai bahwa pendekatan lama yang hanya mengajarkan penggunaan perangkat digital sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi era AI.

4. Misinformasi, disinformasi, dan hoaks: Indonesia masih menghadapi tingginya penyebaran berita palsu; ujaran kebencian; propaganda digital; penipuan daring; manipulasi informasi melalui media sosial. Fenomena ini semakin kompleks dengan hadirnya AI yang mampu menghasilkan teks, gambar, maupun video yang sulit dibedakan dari konten asli.
5. Budaya penggunaan internet yang belum sehat: Permasalahan lain adalah perilaku digital masyarakat, seperti kecanduan media sosial; perundungan siber ("*cyberbullying*"); rendahnya etika digital; penyebaran konten negatif. Kementerian KOMDIGI bahkan menyoroti meningkatnya adiksi layar ("*screen addiction*") di kalangan anak dan remaja sebagai tantangan serius yang memerlukan literasi digital sekaligus pendampingan keluarga.
6. Rendahnya keterlibatan keluarga dan sekolah: Literasi digital tidak hanya dibebankan hanya kepada pemerintah, orang tua, guru, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, dan dunia usaha memiliki peran penting dalam membentuk perilaku digital masyarakat. Kementerian KOMDIGI terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan talenta dan literasi digital.
7. Besarnya jumlah sasaran: Indonesia memiliki lebih dari 220 juta pengguna internet, tersebar di ribuan pulau dengan karakteristik sosial, budaya, bahasa, pendidikan, dan ekonomi yang sangat beragam. Kondisi ini membuat pelaksanaan program literasi digital menjadi sangat kompleks. Pemerintah mengakui bahwa menjangkau seluruh pengguna internet tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan ekosistem mitra yang luas.
8. Keterbatasan kolaborasi dan kapasitas kelembagaan: Literasi digital melibatkan banyak kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, perusahaan teknologi, dan media. Tantangannya adalah memastikan koordinasi, sinkronisasi program, serta menghindari duplikasi kegiatan. Kementerian KOMDIGI memperluas jejaring kemitraan dan mengembangkan program seperti 100 Pandu Literasi Digital untuk memperkuat implementasi di lapangan.
9. Kesenjangan kompetensi tenaga pendidik dan narasumber: Tidak semua guru, dosen, penyuluh, maupun narasumber literasi digital memiliki kompetensi yang memadai mengenai AI; keamanan siber; perlindungan data pribadi; etika digital; teknologi digital terkini. Akibatnya, materi yang diberikan sering kali belum mengikuti perkembangan teknologi secara cepat.

10. Kesenjangan antara literasi digital dan kebutuhan dunia kerja: Dunia kerja semakin membutuhkan kemampuan seperti analisis data; pemanfaatan AI; keamanan siber; kolaborasi digital; otomatisasi proses bisnis. Sementara itu, sebagian program literasi digital sebelumnya masih berfokus pada kemampuan dasar menggunakan internet. Kementerian KOMDIGI kini mengarahkan kebijakannya pada “*upskilling*” dan “*reskilling*” agar lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi digital.

Standar Kompetensi Bagi Narasumber Literasi Digital

Secara komprehensif, narasumber literasi digital adalah individu yang mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan edukasi literasi digital berdasarkan penguasaan kompetensi digital, pedagogik, komunikasi, etika, dan profesionalisme, sehingga peserta mampu memanfaatkan teknologi digital secara aman, cerdas, kritis, etis, produktif, dan bertanggung jawab. Standar Kompetensi Narasumber Literasi Digital perlu disusun dalam bentuk Pedoman Nasional skema sertifikasi profesi, atau kurikulum pelatihan narasumber. Kualifikasi narasumber literasi digital umumnya mencakup kompetensi substantif, pengalaman praktis, kemampuan komunikasi, dan integritas.

Di Indonesia, belum ada satu peraturan yang secara universal menetapkan standar nasional bagi semua narasumber literasi digital, tetapi berbagai program pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi menggunakan kriteria yang relatif serupa. Berikut adalah keterampilan digital yang dianggap paling esensial:

Keterampilan	Penjelasan
1. Information and Data Literacy	Mampu mencari, menemukan, mengevaluasi, mengelola, dan menggunakan informasi digital secara efektif. Termasuk kemampuan membedakan informasi yang kredibel dari hoaks atau disinformasi.
2. Digital Communication and Collaboration	Menggunakan email, media sosial, aplikasi kolaborasi, konferensi video, dan platform digital untuk berkomunikasi serta bekerja sama secara efektif lintas organisasi dan negara.
3. Digital Content Creation	Mampu membuat, mengedit, dan mempublikasikan berbagai bentuk konten digital seperti dokumen, presentasi, video, infografik, podcast, maupun aplikasi sederhana. Memahami hak cipta dan lisensi digital juga menjadi bagian dari kompetensi ini.
4. Cybersecurity Awareness	Memahami keamanan siber, perlindungan data pribadi, penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi multifaktor, mengenali phishing, malware, ransomware, dan praktik keamanan digital lainnya.
5. Problem Solving Using Digital Technology	Memanfaatkan teknologi digital untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan produktivitas, mengotomatisasi pekerjaan, dan memilih aplikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan.

Keterampilan	Penjelasan
6. Critical Thinking and Media Literacy	Mengevaluasi sumber informasi, mengenali bias, propaganda, manipulasi digital, deepfake, dan misinformasi. Sangat penting di era media sosial dan AI generatif.
7. Digital Ethics and Citizenship	Memahami etika digital, privasi, hak digital, jejak digital (digital footprint), perilaku yang bertanggung jawab di dunia maya, serta menghormati hak orang lain dalam ruang digital.
8. Artificial Intelligence (AI) Literacy	Memahami cara kerja AI secara dasar, manfaat dan keterbatasannya, mampu menggunakan AI secara produktif, menyusun <i>prompt</i> yang efektif, serta mengevaluasi hasil AI secara kritis.
9. Data Literacy	Mampu membaca, menginterpretasikan, menganalisis, dan memvisualisasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (<i>"evidence-based decision making"</i>).
10. Adaptability and Lifelong Learning	Memiliki kemampuan belajar teknologi baru secara mandiri karena perkembangan digital berlangsung sangat cepat.

Upaya Kementerian KOMDIGI Untuk Meningkatkan Literasi Digital Nasional Ke Depan

Untuk meningkatkan literasi digital Indonesia secara berkelanjutan, Kementerian KOMDIGI perlu mengambil langkah-langkah untuk menggeser pendekatan dari *"sekadar pelaksanaan pelatihan massal"* menjadi *"pembangunan ekosistem literasi digital nasional yang berorientasi pada hasil"* (*"outcome"*), bukan hanya keluaran (*"output"*).

Ke depan, terdapat beberapa Agenda Strategis yang layak menjadi prioritas sbb:

1. Menyusun Peta Jalan (Roadmap) Literasi Digital Nasional: Kementerian KOMDIGI perlu menyusun Roadmap jangka panjang (2026–2035) mencakup target kompetensi nasional; indikator keberhasilan yang terukur; pembagian peran kementerian/lembaga; pembiayaan yang berkelanjutan; mekanisme evaluasi tahunan. Roadmap tersebut harus selaras dengan transformasi digital nasional, pembangunan SDM, serta visi Indonesia Emas 2045.
2. Menetapkan Standar Kompetensi Literasi Digital Nasional: Indonesia memerlukan standar kompetensi yang berlaku secara nasional, mengacu pada praktik internasional seperti: Digital Competence Framework (DigComp Uni Eropa); UNESCO Digital Literacy Framework. Standar tersebut dapat dibagi dalam beberapa level (Dasar, Menengah, Mahir, Profesional). Kompetensi yang ditetapkan meliputi informasi dan data; komunikasi digital; keamanan siber; etika digital; pembuatan konten digital; pemanfaatan AI; pemecahan masalah digital.

3. Mengintegrasikan Literasi Digital dalam Sistem Pendidikan: Literasi digital sebaiknya tidak lagi menjadi program pelatihan terpisah, tetapi menjadi bagian dari kurikulum mulai dari PAUD; SD; SMP; SMA; Perguruan tinggi; Pendidikan vokasi. Guru dan dosen juga perlu mendapatkan sertifikasi kompetensi literasi digital secara berkala.
4. Meningkatkan Kompetensi AI (AI Literasi): Ke depan, literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan penggunaan internet. Masyarakat perlu memahami Artificial Intelligence (AI); Generative AI; keamanan penggunaan AI; etika AI; bias algoritma; deepfake; prompt engineering; verifikasi hasil AI; perlindungan data pribadi. AI Literacy akan menjadi salah satu kompetensi dasar masyarakat digital.
5. Mengembangkan Program Berbasis Kelompok Sasaran: Kebutuhan setiap kelompok masyarakat berbeda, sehingga materi perlu disesuaikan. Misalnya materi untuk pelajar; guru; ASN; UMKM; petani; nelayan; lansia; penyandang disabilitas; masyarakat adat; pekerja industry, serta kelompok lainnya. Pendekatan "satu modul untuk semua" sudah tidak lagi memadai.
6. Memperkuat Literasi Keamanan Siber: Ancaman siber terus meningkat setiap tahun. Program literasi keamanan siber perlu mencakup antara lain phishing; ransomware; penipuan daring; pencurian identitas; keamanan akun; autentikasi multi-faktor; perlindungan data pribadi. Kementerian KOMDIGI perlu memperkuat sinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk pengembangan materi dan kampanye keamanan siber.
7. Membangun Sistem Sertifikasi Nasional: Pelatihan sistem sertifikasi nasional perlu diikuti dengan sertifikasi kompetensi yang diakui seperti sertifikasi masyarakat umum; sertifikasi guru; sertifikasi ASN; sertifikasi UMKM; sertifikasi narasumber literasi digital. Sertifikasi dapat mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
8. Meningkatkan Kualitas Narasumber Literasi Digital: Perlu diterapkan standar nasional bagi narasumber yang mencakup kompetensi substansi; kemampuan pedagogi; pengalaman praktis; kemampuan komunikasi; pemahaman etika digital; pembaruan kompetensi secara berkala. Dengan demikian, kualitas penyampaian materi menjadi lebih konsisten di seluruh Indonesia.
9. Mengembangkan Platform Pembelajaran Nasional: Kementerian KOMDIGI dapat mengembangkan platform pembelajaran daring yang menyediakan modul interaktif; video pembelajaran; simulasi keamanan digital; latihan berbasis kasus; asesmen kompetensi; sertifikat digital. Platform ini memungkinkan masyarakat belajar secara mandiri kapan saja.

10. Memperkuat Kolaborasi Pentahelix (melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa). Literasi digital merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah; perguruan tinggi; dunia usaha; komunitas; media. Kolaborasi ini penting untuk memperluas jangkauan program, memperkaya materi, dan memastikan relevansi dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi.
11. Beralih dari Kuantitas ke Dampak: Keberhasilan program sebaiknya tidak hanya diukur dari jumlah peserta; jumlah pelatihan; jumlah kota, peningkatan skor literasi digital, tetapi perlu juga mengukur tingkat penurunan kasus penipuan digital; peningkatan penggunaan layanan digital pemerintah; peningkatan produktivitas UMKM melalui teknologi digital; peningkatan keamanan digital masyarakat. Evaluasi berbasis dampak akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas program.
12. Memperkuat Riset dan Monitoring: Kementerian KOMDIGI perlu membangun pusat riset literasi digital untuk memetakan tingkat literasi digital nasional; mengidentifikasi kesenjangan antar-wilayah; mengevaluasi efektivitas program; mengkaji tren teknologi baru; memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Data hasil riset menjadi dasar bagi penyusunan “Kebijakan Literasi Digital Nasional” yang adaptif.

Prioritas Agenda Strategis Kementerian KOMDIGI 2026–2035 Dalam Pengembangan Literasi Digital Nasional

Jika disusun berdasarkan urgensi, prioritas kebijakan dan strategi pengembangan Literasi Digital Nasional dapat dirangkum sebagai berikut:

Prioritas	Agenda Strategis
1	Menetapkan standar kompetensi literasi digital nasional
2	Mengintegrasikan literasi digital ke dalam sistem pendidikan
3	Mengembangkan AI Literacy sebagai kompetensi dasar
4	Memperkuat literasi keamanan siber dan perlindungan data pribadi
5	Membangun sistem sertifikasi nasional bagi peserta dan narasumber
6	Mengembangkan platform pembelajaran digital nasional
7	Memperkuat kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media
8	Mengubah indikator keberhasilan dari jumlah peserta menjadi dampak yang terukur
9	Memperkuat riset, evaluasi, dan pemanfaatan data untuk kebijakan
10	Menyusun Roadmap Literasi Digital Nasional 2026–2035

Tantangan dalam Literasi Digital

Di era pesatnya perkembangan teknologi digital, kemampuan untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan teknologi digital merupakan kompetensi yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan individu di berbagai aspek kehidupan. Meskipun literasi digital menawarkan berbagai peluang dalam bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan kehidupan sosial, implementasinya juga menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dari individu, pendidik, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan literasi digital adalah kesenjangan digital (*“digital divide”*), yaitu kesenjangan antara individu atau kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi digital dengan mereka yang tidak memiliki akses yang memadai. Meskipun perkembangan teknologi terus berlangsung, ketimpangan dalam ketersediaan akses internet yang andal, kepemilikan perangkat digital, serta kesempatan memperoleh pelatihan keterampilan digital masih terjadi, terutama pada kelompok masyarakat marginal dan wilayah yang kurang terlayani. Kesenjangan digital tersebut memperburuk ketidaksetaraan dalam bidang pendidikan, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis, sehingga menghambat kemajuan sosial dan ekonomi.

Tantangan berikutnya adalah pesatnya perkembangan teknologi, yang sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan memperoleh keterampilan digital baru. Perkembangan teknologi yang sangat dinamis menyebabkan individu harus terus memperbarui pengetahuan dan kompetensinya agar tidak tertinggal oleh perubahan berbagai platform, aplikasi, maupun perangkat digital. Kondisi ini dapat menimbulkan kesenjangan keterampilan digital (*“digital skills gap”*), khususnya di dunia kerja.

Selain itu, melimpahnya informasi yang tersedia di internet juga menciptakan fenomena *“information overload”*, yaitu kondisi ketika pengguna dibanjiri informasi dalam jumlah yang sangat besar sehingga semakin sulit membedakan informasi yang kredibel dengan misinformasi, disinformasi, berita palsu (*“fake news”*), maupun informasi yang bersifat manipulatif. Privasi dan keamanan digital (*“privacy and digital security”*) juga menjadi tantangan penting dalam literasi digital. Masih banyak masyarakat yang belum memahami risiko pelanggaran privasi, praktik terbaik dalam perlindungan data pribadi, maupun ancaman keamanan siber. Kondisi tersebut menyebabkan mereka rentan menjadi korban penipuan daring (*“online fraud”*), pencurian identitas (*“identity theft”*), serangan siber, maupun berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Di sisi lain, semakin luasnya penggunaan media sosial dan platform komunikasi digital juga memunculkan kekhawatiran mengenai pelanggaran hak privasi, pengawasan digital (*“digital surveillance”*), serta penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan maupun pemerintah.

Literasi digital juga menghadapi tantangan dalam aspek etika digital dan kewargaan digital (*“digital ethics and digital citizenship”*). Meskipun literasi digital menekankan pentingnya perilaku yang bertanggung jawab di ruang digital, kenyataannya masih banyak individu yang terlibat dalam berbagai bentuk perilaku tidak etis, seperti perundungan siber (*cyberbullying*), pelecehan daring (*“online harassment”*), ujaran kebencian (*“hate speech”*), penyebaran informasi yang menyesatkan, hingga kecanduan digital (*“digital addiction”*). Anonimitas yang disediakan oleh berbagai platform digital sering kali mengurangi rasa tanggung jawab pengguna terhadap perilaku mereka di dunia maya, sehingga memperparah berbagai bentuk penyimpangan perilaku dan menciptakan lingkungan digital yang tidak sehat (*“toxic online environment”*). Oleh karena itu, pendidikan mengenai etika digital, pembentukan budaya komunikasi yang saling menghormati, serta peningkatan kesadaran terhadap konsekuensi dari setiap aktivitas digital menjadi sangat penting dalam membangun komunitas digital yang sehat, aman, dan produktif.

Mengatasi berbagai tantangan tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, penyedia teknologi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diperlukan untuk meningkatkan akses terhadap teknologi, memperkuat kompetensi digital masyarakat, serta menciptakan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Literasi digital merupakan salah satu kompetensi fundamental yang diperlukan untuk menghadapi kompleksitas kehidupan di abad ke-21. Penguasaan literasi digital memungkinkan individu memperoleh akses terhadap berbagai peluang pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan partisipasi dalam proses demokrasi, sekaligus meningkatkan daya saing dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Namun demikian, terwujudnya literasi digital yang merata tidak dapat dicapai tanpa komitmen bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri.

Secara umum, kondisi literasi digital Indonesia menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan meningkatnya kemampuan dasar masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Namun, peningkatan tersebut masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan antar-wilayah, rendahnya kemampuan berpikir kritis, maraknya hoaks dan penipuan digital, lemahnya kesadaran keamanan siber, serta belum meratanya kompetensi digital tenaga kerja. Oleh karena itu, penguatan literasi digital perlu difokuskan tidak hanya pada peningkatan akses teknologi, tetapi juga pada pengembangan keterampilan digital, etika bermedia digital, keamanan digital, dan budaya digital agar masyarakat mampu berpartisipasi secara aman, produktif, dan bertanggung jawab dalam ekosistem digital.

Tantangan terbesar Kementerian KOMDIGI bukan lagi sekadar meningkatkan jumlah masyarakat yang melek digital, melainkan membangun masyarakat yang benar-benar cakap digital. Hal ini mencakup kemampuan menggunakan teknologi secara kritis, aman, etis, produktif, dan adaptif terhadap perkembangan AI (*“Artificial Intelligence”*). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, komunitas, dan keluarga agar literasi digital menjadi fondasi transformasi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, peran Kementerian KOMDIGI tidak lagi cukup sebagai penyelenggara pelatihan literasi digital tetapi perlu menjadi orkestrator ekosistem literasi digital nasional yang menetapkan standar kompetensi, mengoordinasikan para pemangku kepentingan, mendorong integrasi ke dalam pendidikan formal dan nonformal, serta memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi digital—termasuk kecerdasan buatan—secara produktif, aman, kritis, etis, dan inklusif. Pendekatan ini akan memperkuat daya saing sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi transformasi digital dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas literasi digital masyarakat di abad ke-21, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dipertimbangkan oleh Kementerian KOMDIGI antara lain:

Mengadopsi standar literasi digital yang bersifat universal. Pemerintah bersama organisasi internasional perlu membangun kerangka kompetensi literasi digital yang dapat diterapkan secara luas dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing negara.

Mendorong akses digital yang inklusif. Investasi pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi, penyediaan layanan internet yang terjangkau, serta distribusi perangkat digital perlu diprioritaskan agar kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan memperoleh kesempatan yang setara.

Mendukung pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning). Pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta perlu menyediakan berbagai program pendidikan orang dewasa, pelatihan peningkatan kompetensi (*“upskilling”*), maupun peningkatan keterampilan baru (*“reskilling”*) melalui platform pembelajaran yang mudah diakses.

Mendorong penggunaan teknologi digital secara kritis dan etis. Program literasi digital perlu membekali masyarakat dengan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, keamanan siber, pencegahan misinformasi dan disinformasi, serta penciptaan konten digital yang bertanggung jawab.

Mengintegrasikan literasi digital dengan literasi lainnya. Literasi digital sebaiknya dikembangkan secara terpadu dengan literasi media, literasi keuangan, literasi data, literasi informasi, dan literasi kewarganegaraan, agar tercipta kompetensi yang komprehensif dalam menghadapi tantangan masyarakat digital ke depan.

Jakarta, 1 Agustus 2026

Referensi:

1. Essential Digital Literacy Skills for The 21st Century, Dr. Amrit Kaur, Senior Librarian in National Institute of Fashion Technology (NIFT), Head Office, New Delhi
2. Foundation Skills for your Future Program, Draft Digital Literacy Skill Framework, Australian Government, April 2020
3. Literasi Digital Masyarakat Indonesia Membaik, KOMDIGI, 11 Februari 2022
4. Critical Digital Literacy In Education: A Handbook by and for Teachers, Heinrich Boll, Kansu Ekin, Tanca, et.al, Istanbul, Turkey, September 2022
5. Status Literasi Digital Indonesia Tahun 2022, KOMDIGI, 2 Februari 2023
6. Literasi Digital Tahun 2022 Meningkatkan, KOMINFO Tetap Perhatikan Index Keamanan, 5 Maret 2023
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Literasi Digital Untuk Segmen Masyarakat/Komunitas, KOMINFO, 2024
8. Digital Literacy and Concepts, The Academic Year 2023 – 2024, J. Robin Deepak, St. John's College
9. OECD Digital Education Outlook 2026: Exploring Effective Uses of Generative AI in Education, OECD 2026
10. Charter for Public Digital Learning Platforms, UNESCO - UNICEF – ITU, March 19, 2026

